

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional yang kita hadapi saat ini terhadap masalah, antara lain: peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan program wajib belajar 12 tahun, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program sekolah gratis, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program DIPA dari pemerintah, dan lain-lain. Melalui program tersebut penduduk Indonesia diharapkan menjadi warga yang terdidik dan dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat berperan serta dalam membangun bangsa dan negara. Selanjutnya, pemerintah telah membuat kebijakan secara umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut adalah penerapan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian”.

Dari kedelapan Standar Nasional Pendidikan di atas, yang menjadi fokus pada penelitian ini hanya mengambil salah satu, yaitu standar pembiayaan. 1). Pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana, 2). ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah”. 3). Pendidikan tidak terlepas dari pembiayaan pendidikan, Pembiayaan pada suatu Madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan pembelajaran di Madrasah. (Nanang Fattah, 2006:112)

Biaya pendidikan diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan parabot/mebeler, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah (Nanang Fattah, 2006:112).

Fenomena yang menjadi kesenjangan di MTsN 1 Serang ini, adalah menjalankan tahapan Manajemen Pembiayaan, Perencanaan (*budgeting*) dilakukan, Pelaksanaan (*accounting*) dilakukan, pada Pengawasan (*Auditing*) tidak dilakukan. (Hasil wawancara dengan Ibu Rosnani, S.H Tata Usaha di MTsN 1 Serang pada tanggal 13 Desember 2016).

Perbedaan penelitian yang sudah ada dengan yang diteliti, karena Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Serang berlabel Negeri dan sebagai panutan bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitarnya. Akan tetapi perkembangan sekolah terus-menerus berkembang pesat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan banyak hal yang menarik untuk diteliti, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembiayaan madrasah yang ada, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini terlihat dengan bukti fisik yang berbentuk laporan keuangan yang jelas, dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Segala pengeluaran yang dilakukan dalam biaya pendidikan dimuat dalam Rencana Anggaran Pembiayaan Sekolah (RAPBS). Segala pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baik berupa uang maupun barang harus jelas dan transparan pengeluaran dan pemasukannya tertulis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menganalisis berbagai persoalan yang terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya di madrasah. Anggaran yang didapat MTsN 1 Serang tidak selalu memenuhi kebutuhan yang diperlukan di MTsN 1 Serang tersebut. MTsN 1 Serang termasuk sekolah negeri, di sisi lain kebijakan pemerintah untuk menerima peserta didik yang kurang mampu banyak, tetapi dana yang tersedia belum sesuai dengan realitas yang ada sehingga pihak dari MTsN 1 Serang kesulitan dan kekurangan dalam hal pembiayaan karena keuangan dan pembiayaan merupakan sumber daya secara langsung menunjang efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan serta keterbatasan anggaran yang tersedia akan mengalami dampak negatif bagi kemajuan sekolah. Adapun masalah utamanya adalah, MTsN 1 Serang ini tidak melaksanakan tahapan fungsi manajemen yaitu komite madrasah tidak dilibatkan dalam manajemen pembiayaan khususnya pelaporan (*auditing*) terlihat bahwa

civitas akademik madrasah termasuk komite madrasah tidak mengetahui fungsi manajemen tersebut. Hal ini lah yang menjadi kesenjangan di madrasah sehingga perlu untuk diteliti.

Berdasarkan studi pendahuluan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Serang. Pada tanggal 12 November dan tanggal 13 November 2016. Peneliti mewawancarai Ibu Rosnani, S.H Tata Usaha di MTsN 1 Serang. Peneliti mendapatkan gambaran bahwa MTsN 1 Serang merupakan lembaga pendidikan Islam yang dibawah Naungan Kementrian Agama yang Sudah terakreditasi A. sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. dengan pembiayaan yang berasal dari Dana Pemerintah DIPA, Dan Dana BOS Komite dari Kota Serang. (Hasil wawancara staf tata usaha Ibu Rosnani, SH)

Dari identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan penelitian dengan judul sebagai berikut : MANAJEMEN PEMBIAYAAN MADRASAH (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah 1 Kota Serang).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di rinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar alamiah MTs Negeri 1 Serang ?
2. Bagaimana Perencanaan Keuangan (*budgeting*) pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Keuangan (*accounting*) pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang ?
4. Bagaimana Pengawasan Keuangan (*auditing*) pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang?

5. Apa Faktor penunjang dan penghambat pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang ?
6. Bagaimana hasil yang dicapai dari pengelolaan pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain:

- a. Mendeskripsikan latar alamiah MTs Negeri 1 Serang.
- b. Mendeskripsikan Perencanaan Keuangan (*budgeting*) pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang.
- c. Mendeskripsikan Pelaksanaan Keuangan (*accounting*) pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang.
- d. Mendeskripsikan Pengawasan Keuangan (*auditing*) pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang.
- e. Mendeskripsikan Faktor penunjang dan penghambat pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang.
- f. Mendeskripsikan hasil yang dicapai dari pengelolaan pembiayaan di MTs Negeri 1 Serang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini dapat berguna:
 - 1) Untuk kajian Teori dan Konsep pembiayaan Pendidikan di lembaga pendidikan.

- 2) Untuk memperkaya khasanah ilmu Manajemen Pembiayaan bagi para pengelola madrasah.
 - 3) Menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan keilmuan ilmu pendidikan Islam dalam bidang Pembiayaan Madrasah.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini:
- 1) Berguna bagi madrasah agar dapat meningkatkan Mutu dan agar dapat menghasilkan madrasah yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pembiayaan.
 - 2) Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dalam perkuliahan Manajemen Pendidikan Islam khususnya mengenai Pembiayaan Madrasah.
 - 3) Menambah masukan bagi praktisi Pendidikan Islam dalam melakukan pengembangan pembiayaan madrasah.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan serta orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini tidak akan terlepas dari pengaruh latar alamiah, sehingga akan memengaruhi semua aktivitas di lokasi penelitian. Penelitian ini akan mengkaji masalah yang dilandasi dengan kajian mengenai latar alamiah mengenai keberadaan MTs Negeri 1 Serang sebagai tempat penelitian.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31

menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran”. Hal ini membuktikan adanya langkah dan upaya pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya tidak semua warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan selayaknya dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalanya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20 % dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa alokasi dana secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan pembiayaan sangat penting diperhatikan agar dapat mengembangkan mutu lembaga. Dalam Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2015 tentang *standar Nasional Pendidikan* menyebutkan bahwa “yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan salah satunya ialah standar pembiayaan pendidikan”.

Biaya dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan “biaya pendidikan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan” (Nanang Fattah, 2009:112).

Biaya dalam pendidikan terdiri dari: “biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)” (Nanang Fattah, 2009:23). Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan belajar bagi siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, saran belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. sedangkan biaya tidak langsung

berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Pembiayaan menjadi dua kategori, yaitu: pertama, biaya lancar (*recurrent cost*) yang mencakup semua pengeluaran untuk keperluan konsumtif seperti bahan-bahan dan buku pelajaran, jasa-jasa yang memberikan manfaat jangka pendek dan secara reguler diperbaharui, kedua, biaya kapital (*capital cost*) meliputi pembelian barang tahan lama seperti gedung atau perlengkapan lain yang memberikan manfaat dalam jangka panjang (Wiko Saputra, dkk. 2000:3).

Masruroh (2013:4) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan pembiayaan yang memadai akan berakibat pada berlangsungnya pembelajaran yang maksimal”. Sehingga kegiatan manajemen pembiayaan di madrasah perlu dikelola dengan efektif dan efisien. Maka diperlukan sumber daya yang baik agar pembiayaan dapat dikelola dengan baik.

Manajemen keuangan diartikan sebagai segala aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. (Sri Minarti, 2011:212). Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan pembiayaan pendidikan demi mewujudkan upaya keberlangsungan pembelajaran dan memadainya kebutuhan infrastruktur agar kegiatan di madrasah lebih efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber daya yang sudah ada untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, maka dari itu manajemen pembiayaan, meliputi: Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Manajemen memiliki tiga tahapan penting, yaitu: tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian. Ketiga tahapan tersebut apabila diterapkan

dalam manajemen keuangan menjadi: tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan keuangan (*accounting*) dan tahap penilaian atau pelaporan keuangan (*auditing*)". (Masruroh, 2013:21).

Manajemen pembiayaan adalah mengelola dan merencanakan suatu keuangan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar seperti sarana prasarana, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya, oleh karena itu harus memenuhi tatanan manajemen pembiayaan yaitu: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan keuangan madrasah.

Dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

- a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintah, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.
- b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF, Unesco, pajak khusus yang hasil seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
- c. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.

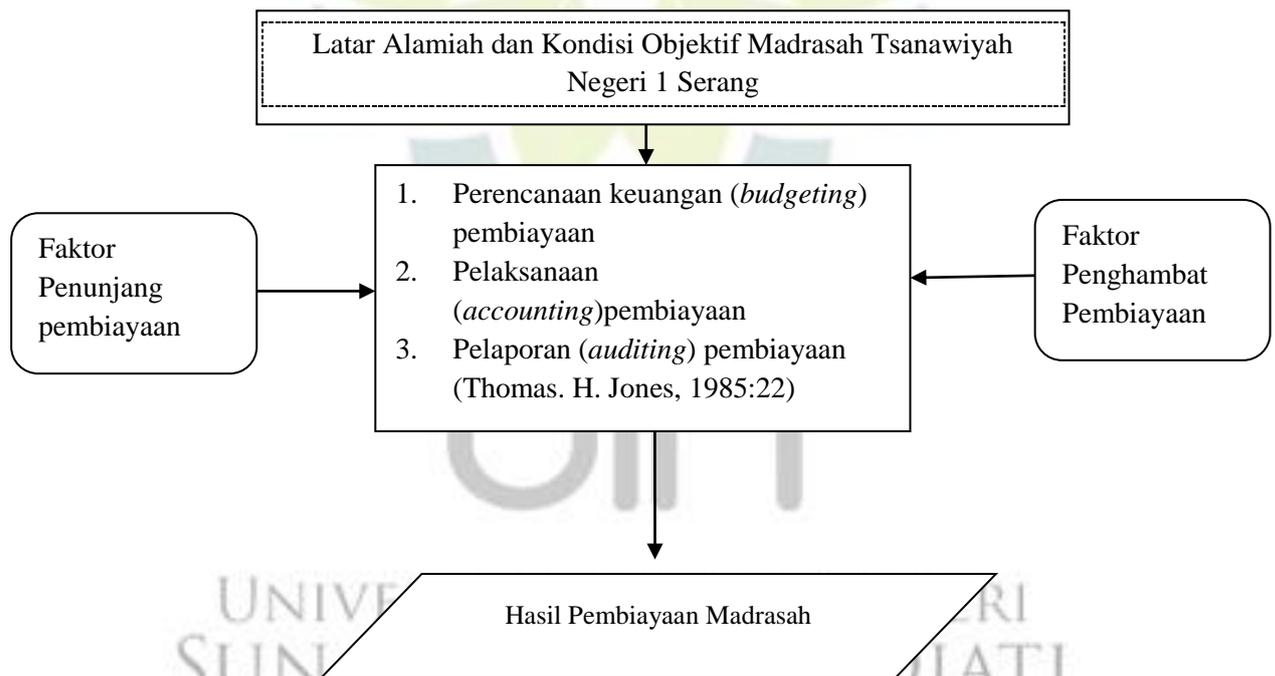
d. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela (Bidayatun Ni'mah, 2009:23).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan Madrasah, yaitu:

- 1) Pada setiap akhir tahun anggaran, bendaharawan harus membuat laporan keuangan kepada komite pesantren untuk dicocokkan dengan RAPBP.
- 2) Laporan keuangan harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada, termasuk bukti penyetoran pajak (PPN dan PPh) bila ada.
- 3) Kuitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan berupa tanda tangan penerima honorarium atau bantuan atau bukti pengeluaran lain yang sah.
- 4) Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite pesantren (M. Sulthon Masyhud & Moh. Khusnurdilo, 2005: 190).

Dalam kajian ini membahas tentang latar alamiah, sumber pembiayaan pendidikan, perencanaan (*budgeting*) pembiayaan pendidikan, pelaksanaan (*accounting*), pelaporan (*auditing*) pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan manajemen tidak terlepas dari faktor penunjang dan penghambat. Faktor penunjang adalah segala hal yang membantu dan mendukung terhadap pelaksanaan pembiayaan dalam mencapai tujuan, sedangkan faktor penghambat adalah segala hal yang dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembiayaan dalam mencapai tujuan. Faktor penunjang dan penghambat dapat bersumber dari faktor intern dan ekstern, seperti masalah administratif, pendanaan, sarana

prasarana, kegiatan madrasah atau lingkungan masyarakat sekitar. Perbedaan penelitian yang sudah ada dengan yang diteliti karena Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Serang Komite madrasah tidak dilibatkan akan proses pembiayaan khususnya *auditing* dilakukan oleh siapa, padahal madrasah ini sudah berstatus Negeri. Akan tetapi perkembangan sekolah terus-menerus berkembang pesat pada umumnya. Untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami kerangka pemikiran ini, maka penulis membuat skema kerangka pemikiran penelitian tentang manajerial pembiayaan pendidikan di MTs Negeri 1 Serang sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 1 Serang.